



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Basuki Rahmat No. 1, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa – Kota Kupang

Website: <http://dkp.nttprov.go.id>; E-mail: dkpnttprov@gmail.com

KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan Akuntansi dan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan.

Penyusunan laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kupang, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701019 199903 2 004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran serta Posisi Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701019 199903 2 004

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, telah memuat informasi penggunaan keuangan selama tahun anggaran 2025. Sehingga lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan ini dibuat untuk mendukung pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik, transparan dan efisien.

Laporan ini merupakan hasil proses pencatatan dan pengiktisaran data transaksi keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan secara jelas dan transparan. Demikian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kami. Terima Kasih.

Kupang, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701019 199903 2 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang -Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT;
12. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan dan Bagan Akun Standar.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- B. Laporan Operasional (LO)
- C. Neraca
- D. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab V Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Alokasi anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT terdiri dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Untuk belanja daerah mengalami perubahan/pergeseran sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perubahan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2025

No. Urut	Nomor dan Tanggal DPA/DPPA	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan Perubahan
1	DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal, 23 Desember 2024	55.958.303.600	DPA Murni
2	DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal, 12 Juni 2025	23.612.702.916	Perubahan I
3	DPPA/A.4/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal, 23 Oktober 2025	22.170.815.487	Perubahan II
4	DPPA/A.4/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal, 19 November 2025	22.170.815.487	Perubahan III

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : DPPA/ A.4/ 3.25.0.00.0.00.01.0000/ 001/2025 Tanggal 19 November 2025 sebagai Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja perubahan terakhir Tahun Anggaran 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan tanggung jawab pengelolaan anggaran dengan keadaan sebagai berikut :

❖ Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 yang dipungut melalui Pengelolaan Jenis Retribusi Jasa Usaha sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 dan tidak mengalami peningkatan/penurunan pada perubahan APBD sebesar Rp.0,00-. Dari target tersebut, dapat terrealisir sebesar *Rp 9.756.965.806,-* atau 97,57 % dengan rincian per Obyek Retribusi diuraikan sebagai berikut :

- Penyediaan Tempat Khusus Parkir Luar Badan Jalan direalisir *Rp 658.190.000,-* atau 87,76 % dari target sebesar *Rp 750.000.000,-*
- Jasa Kepelabuhan direalisir sebesar *Rp 730.739.279,50,-* atau 70,85 % dari target yang ditetapkan sebesar *Rp 1.031.407.600,-*
- Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga direalisir sebesar *Rp 2.678.027.500,-* atau 151,85% dari target yang ditetapkan sebesar *Rp 1.763.592.400,-*
- Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah direalisir sebesar *Rp 3.693.462.255,50,-* atau 82,54 % dari target yang ditetapkan sebesar *Rp 4.475.000.000,-*

- Pemanfaatan Aset Daerah direalisasi sebesar *Rp 1.996.546.771,-* atau *100,84%* dari target sebesar *Rp 1.980.000.000,-*

Tabel 2.2 Target dan Realisasi PAD Tahun Anggaran 2025

Nomor	Obyek Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.02.02.14.001	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Luar Badan Dalam	750.000.000	658.190.000	87,76
4.1.02.02.16.001	Jasa Kepelabuhanan	1.031.407.600	730.739.279,50	70,85
4.1.02.02.17.001	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	1.763.592.400	2.678.027.500	151,85
4.1.02.02.19.0001	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.475.000.000	3.693.462.255,50	82,54
4.1.02.02.20.001	Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.980.000.000	1.996.546.771	100,84
TOTAL		10.000.000.000	9.756.965.805	97,57

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar *Rp. 8.324.238.816,17* atau *87,62 %* dari target *Rp.9.500.000.000,00* maka mengalami peningkatan sebesar *Rp. 1.432.726.989.*

❖ Belanja

Rencana belanja daerah untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur APBD Murni sebesar *Rp. 55.958.303.600* mengalami pengurangan pada perubahan APBD sebesar *Rp. 33.787.488.113* sehingga menjadi sebesar *Rp. 22.170.815.487,00*

Tahun 2025 belanja terealisasi sebesar *Rp.18.913.798.556* atau *85,31 %* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 22.170.815.487,00.* yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar *Rp 22.151.188.587,-* dan Belanja Modal sebesar *Rp 19.626.900,-.* Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, terealisasi sebesar *Rp 18.913.798.556,-* atau *85,31%* dari target sebesar *Rp 22.170.815.487,-*

Seluruh belanja langsung dijabarkan ke dalam program dan kegiatan secara berurutan berdasarkan kode rekening sebagai berikut :

01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar *Rp. 17.340.216.858,-* atau *86,96 %* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 19.941.238.138,-* terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 01.1.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi *Rp. 114.766.000,-* atau *86,96 %* dari target *Rp. 132.392.500,-*

- 01.1.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar *Rp. 13.251.104.832,-* atau *86,58 %* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 15.305.826.426,-*
- 01.1.03. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terealisasi *Rp. 692.850,-* atau *99,98 %* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 693.000,-*
- 01.1.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar *Rp. 66.570.895,-* atau *83,27 %* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 79.948.032,-*
- 01.1.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar *Rp. 17.614.500,-* atau *95,45%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 18.455.000,-*
- 01.1.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar *Rp. 3.656.070.812,-* atau *88,65%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 4.124.337.680,-*
- 01.1.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi *Rp. 214.332.969,-* atau *82,57%* dari rencana sebesar *Rp. 259.585.500,-*
- 01.1.14. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan terealisasi *Rp. 19.064.000,-* atau *95,32%* dari rencana sebesar *Rp. 20.000.000,-*

Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025

Nomor	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01.	Penunjang Urusan pemerintahan Provinsi	19.941.238.138	17.340.216.858	86,96
01.1.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	132.392.500	114.766.000	86,69
01.1.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	15.305.826.426	13.251.104.832	86,58
01.1.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	693.000	692.850	99,98
01.1.06	Administrasi umum perangkat daerah	79.948.032	66.570.895	83,27
01.1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	18.455.000	17.614.500	95,45
01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4.124.337.680	3.656.070.812	88,65
01.1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	259.585.500	214.332.969	82,57
01.1.14	Fasilitasi keprotokolan	20.000.000	19.064.000	95,32

02. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terealisasi sebesar *Rp. 6.362.500,-* atau *60,13%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 10.582.000,-* yang terdiri dari :

02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi direalisasi sebesar *Rp. 6.362.500,-* atau *60,13%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 10.582.000,-*

Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Belanja Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Nomor	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
02.	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	10.582.000	6.362.500	60,13
02.1.01	Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi	10.582.000	6.362.500	60,13

03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terealisasi sebesar *Rp. 525.117.978,-* atau *55,88%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 939.671.049,-* terdiri dari :

03.1.01. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil terealisasi sebesar *Rp. 6.500.000,-* atau *100 %* dari target sebesar *Rp. 6.500.000,-*

03.1.03. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu Daerah Provinsi tidak terealisasi anggarannya atau sebesar *Rp. 0,-* atau *0%* dari target sebesar *Rp. 500.000,-*

03.1.04. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT terealisasi sebesar *Rp. 10.499.850,-* atau *91,30%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 11.500.000,-*

03.1.05. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terealisasi sebesar *Rp. 14.280.400,-* atau *96,62 %* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp 14.780.000,-*

03.1.06. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi terealisasi sebesar *Rp. 493.837.728,-* atau *54,48%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 906.390.649,-*

Tabel 2.5 Pagu dan Realisasi Belanja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Nomor	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
03.	Pengelolaan Pengelolaan Perikanan Tangkap	939.671.049	525.117.978	55,88
03.1.01	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	6.500.000	6.500.000	100
03.1.02	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	500.000	-	0
03.1.03	Penertiban izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	11.500.000	10.499.850	91,30
03.1.05	Penertiban tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	14.780.400	14.280.400	96,62
03.1.06	Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi	906.390.649	493.837.728	54,48

- 04.** Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terealisasi sebesar *Rp. 42.316.700,-* atau *89,28 %* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 47.400.000,-* terdiri dari :
- 04.1.01. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi tidak terealisasi sebesar *Rp.1.000.000,-* atau *66,67%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 1.500.000,-*
- 04.1.05. Kegiatan Penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dilaut sampai dengan 12 mil serta tidak menggunakan modal asing/atau tenaga kerja asing terealisasi sebesar *Rp. 10.000.000,-* atau *100%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.. 10.000.000,-*
- 04.1.06. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut terealisasi sebesar *Rp. 1.000.000,-* atau *18,52%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 5.400.000,-*
- 04.1.07. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Laut terealisasi sebesar *Rp. 30.316.700,-* atau *90,40%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 30.500.000,-*

Tabel 2.6 Pagu dan Realisasi Belanja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Nomor	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
04.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	47.400.000	42.316.700	89,28
04.1.01	Penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi	1.500.000	1.000.000	66,67
04.1.02	Penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dilaut sampai dengan 12 mil serta tidak menggunakan modal asing/atau tenaga kerja asing	10.000.000	10.000.000	100
04.1.05	Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	5.400.000	1.000.000	18,52
04.1.06	Pengelolaan pembudidayaan ikan diperairan darat	30.500.000	30.316.700	99,40

05. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan direalisir sebesar *Rp. 81.757.700,-* atau *62,90 %* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 129.977.500,-* terdiri dari :

- 05.1.01. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil direalisir sebesar *Rp. 81.257.700,-* atau *63,63%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 127.707.800,-*
- 05.1.02. Kegiatan Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi direalisir sebesar *Rp. 500.000,-* atau *22,03%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 2.269.700,-*

Tabel 2.7 Pagu dan Realisasi Belanja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Nomor	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
05.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	129.977.500	81.757.700	62,90
05.1.01	Pengawasan sumber daya perikanan sampai dengan 12 mil	127.707.800	81.257.700	63,63
05.1.02	Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	2.269.700	500.000	22,03

06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan direalisir sebesar *Rp. 918.026.820,-* atau *83,31%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 1.101.946.800,-* terdiri dari :

06.1.02 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar direalisasi sebesar *Rp. 918.026.820,-* atau *83,31%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 1.101.946.800,-*

Tabel 2.8 Pagu dan Realisasi Belanja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2025

Nomor	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
06.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.101.946.800	918.026.820	83,31
06.1.02	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1.101.946.800	918.026.820	83,31

B. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan

Secara umum pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa kegiatan tidak terserap yang menyebabkan tidak tercapainya target Pendapatan maupun Belanja.

- Pendapatan
Terdapat 3 (tiga) Obyek Retribusi yang sampai dengan tanggal penutupan Buku 31 Desember 2025 tidak dapat mencapai target retribusi yang ditetapkan yaitu :
 - Penyediaan Tempat Khusus Parkir Luar Badan Jalan yang hanya direalisasi *Rp 658.190.000,-* atau *87,76 %* dari target sebesar *Rp 750.000.000,-*
Tidak tercapainya target ini karena Sistem parkir yang masih manual yang memungkinkan tidak tercatatnya kendaraan yang masuk/keluar oleh petugas parkir serta masih diberlakukan pembayaran Tunai yang memungkinkan terjadinya kelebihan bayar, kekurangan bayar bahkan tidak bayar.
 - Jasa Kepelabuhan direalisasi sebesar *Rp 730.739.279,50,-* atau *70,85%* dari target yang ditetapkan sebesar *Rp 1.031.407.600,-*
Kondisi tidak tercapainya target ini karena penurunan aktifitas bongkar muat kapal perikanan di pelabuhan perikanan hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang baik sehingga terdapat penurunan aktifitas ekonomi di pangkalan pelabuhan perikanan. Selain itu areal kolam labuh yang tidak optimal untuk menampung kapal erikanan yang akan tambat/labuh akibat endangkalan atau areal kolam labuh yang tidak cuku luas untuk disbanding dengan jumlah kapal yang masuk.

- Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah realisasi sebesar *Rp 4.475.000.000,-* atau *82,54 %* dari target yang ditetapkan sebesar *Rp 3.693.462.255,50,-*

Kondisi tidak tercapainya target ini disebabkan oleh belum optimalnya produksi/produktivitas diinstalasi BBIS Noekele, lemahnya pengawasan terhadap produk perikanan yang diantar pulaukan karena kurangnya jumlah SDM Pengawasan di lapangan, belum tersisoalisasikan dengan baik regulasi sector kelautan dan perikanan kepada semua pelaku usaha di kabupaten/kota serta system pembayaran dan pencatatan yang masih manual atau belum seenuhnya menggunakan system digitalisasi/ online.

▪ **Belanja**

Tidak tercapainya penyerapan anggaran belanja pada hampir setiap program dan kegiatan disebabkan karena :

- Adanya perubahan maupun pergeseran anggaran yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang berpengaruh terhadap perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan penumpukan kegiatan dan anggaran pada periode tertentu sehingga proses pencairan anggarapun akan ikut berpengaruh.
- Proses pergantian Uang Persediaan (UP) disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah.
- Program dan kegiatan yang sumber pendanaannya dari DAU dan PAD dibatasi pelaksanaannya sehingga berpengaruh pada serapan anggaran.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Rp.9.756.965.806,- Rp. 8.324.238.816,17

Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp 9.756.965.806,-,- dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dengan capaian 97,57 % yang terdiri dari realisasi retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Luar Badan Jalan sebesar *Rp 658.190.000,-* di PPP Tenau, PPI Oeba dan PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur, Retribusi Jasa Kepelabuhan sebesar *Rp 730.739.279,50*, di PPP Tenau, PPI Oeba dan PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur-, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebesar *Rp 2.678.027.500,-* di Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebesar *Rp 3.693.462.255,50,-* serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar *Rp 1.996.546.771,-* di PPP Tenau, PPI Oeba dan PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur

2. Belanja

Belanja Daerah 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Rp.18.913.798.556,- Rp.44.466.712.289,-

Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 18.913.798.556 atau 85,31% dari rencana yang ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp.22.170.815.487,00, mengalami penurunan sebesar Rp.25.552.913.733,00 atau 40,14% dari tahun sebelumnya yang nilainya Rp.44.446.712.289,00. Belanja Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5.	Belanja Daerah	22.170.815.487,00	18.913.798.556,00	85,31
5.1.	Belanja Operasi	22.151.188.587,00	18.895.534.056,00	85,30
5.2.	Belanja Modal	19.626.900,00	18.264.500,00	93,06

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2025 dengan besaran anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.170.815.487,00 direalisasikan sebesar Rp. 18.913.798.556,00 atau 85,31%, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 22.151.188.587,00 dengan realisasi

Rp. 18.895.534.056,00 atau 85,30% dan Belanja Modal sebesar Rp. 19.626.900,00 dengan realisasi Rp. 18.264.500,00 atau 93,06%.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Penjelasan terhadap masing-masing rincian belanja daerah adalah sebagai berikut :

2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LRA	Rp.18.895.534.056,00	Rp.24.893.673.289,00

Belanja terealisasi sebesar Rp. 18.895.534.056,00 atau 85,30%. dari rencana yang ditetapkan pada perubahan APBD TA. 2025 sebesar Rp.23.151.188.587,00 alami penurunan sebesar Rp.5.998.139.333,00 atau 69,34 % dari tahun sebelumnya yang nilainya Rp.24.893.673.389,00. Belanja Operasi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5.1.01.	Belanja Pegawai	15.305.826.426,00	13.251.104.832,00	86,58
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.845.362.161	5.644.429.224	82,46

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2025 dengan besaran anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 23.151.188.587,00 direalisasikan sebesar Rp. 18.895.534.056,00 atau 69,34% yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.305.826.426,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.251.104.832,00 atau 86,58%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.6,845.362.161,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.664.429.224,00 atau 82,46%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan Penjelasan terhadap masing-masing rincian belanja operasional adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pegawai- LRA	Rp. 13.251.104.832,00	Rp.11.955.058.873,00

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 13.251.104.832,00 atau 86,58% dari target Rp. 15.305.826.426,00 alami kenaikan sebesar Rp. 2.436.348.427,00 atau 56,16% dibandingkan tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.654.704.000,00	11.058.152.235,00	87,38
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.651.122.426,00	2.192.592.597,00	82,72

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp. 11.058.152.235,00 atau 87,38% dari target sebesar Rp. 12.654.704.000,00 disebabkan karena permintaan gaji berdasarkan jumlah PNS dengan perubahan gaji yang berbeda-beda berdasarkan tunjangan yang tertera pada model C dan jabatan yang melekat pada masing-masing PNS. Rincian dari belanja gaji dan tunjangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	9.272.113.124,00	8.285.351.880,00	89,36
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	830.937.654,00	745.710.566,00	89,74
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	589.339.996,00	374.380.000,00	63,53
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	59.567.869,00	55.160.000,00	92,60
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	378.335.682,00	319.990.000,00	84,58
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	903.550.539,00	778.008.840,00	86,11
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.542.987,00	15.273.412,00	98,27
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.324.839,00	118.150,00	2,22
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	483.424.410,00	414.390.026,00	85,72
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	19.359.651,00	17.442.366,00	90,10
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	58.078.854,00	52.326.995,00	90,10
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	39.127.995,00	-	-
Jumlah		12.654.704.000,00	11.058.152.235	87,38

- Rincian pada belanja gaji dan tunjangan yang tidak ada realisasi adalah belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ANS,PNS dan PPPK karena belum adanya peraturan dari Kementerian Keuangan terkait pemotongan iuran tabungan perumahan PNS (TAPERA).
- Belanja tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp. 2.192.952.597,00 atau 82,72% dari target sebesar Rp. 2.651.122.426.00. Pembayaran tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja yang diakumulasi dari hasil olahan data E-kinerja.

Rincian dari belanja tambahan penghasilan ASN dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	308.864.694,00	306.029.079,00	99,08
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.015.740.120,00	1.718.855.455,00	85,27
5.1.01.02.06.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000.000,00	168.068.063	56,02
Jumlah		2.651.122.426,00	2.192.952.597,00	82,72

- Belanja honorarium terealisasi sebesar Rp.160.861.300,00 atau 100% dari target sebesar Rp. 160.861.300,00. Belanja Honorarium terdiri dari belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan belanja honorarium pengadaan barang/jasa. Rincian dari belanja honorarium dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	28.600.000,00	28.600.000,00	100
2.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi informasi dan Pengelola website	1.500.000,00	1.500.000,00	100
3.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.041.300,00	158.041.300,00	100
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.820.000,00	2.820.000,00	100
Jumlah		190.961.300,00	190.961.300,00	100

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang/Jasa- LRA	Rp.5.644.429.224	Rp.12.938.614.416

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 5.644.429.224,00 atau 82,46% dari target sebesar Rp.6.845.362.161,00 mengalami penurunan

sebesar Rp.1.848.654.669,00 atau 68,51% dibandingkan tahun lalu senilai Rp.8.238.921.151,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Barang terealisasi sebesar Rp.1.126.532.189,00 atau 69,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.610.226.989,00 rincian dari belanja barang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.758.800	1.749.400	99,47
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	234.004.600,00	191.886.644,00	82,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.118.000,00	5.039.200,00	98,46
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	16.204.700,00	15.736.480,00	97,11
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.259.900,00	22.006.850,00	77,87
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	478.582.949,00	81.040.800,00	16,93
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.547.620,00	199.222.795,00	89,52
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.715.400,00	9.109.000,00	61,90
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.278.500,00	2.277.500,00	99,96
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.912.300,00	1.412.300,00	73,85
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	677.360,00	613.000,00	90,50
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir atau cindra mata	15.846.000,00	15.860.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.503.600,00	1.485.400,00	98,79
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	405.183.260,00	404.695.120,00	99,88
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan- Pakan	30.500.000,00	30.316.700,00	99,40
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	146.134.000,00	139.095.000,00	95,18
5.1.02.01.01.0074	Belanja pakaian adat daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Jumlah		12.624.231.588	11.813.592.935	93,58

Belanja barang merupakan belanja pakai habis yang direalisasikan berdasarkan kebutuhan rutin yang menunjang kegiatan kantor dan terdapat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang bidang teknis dengan masing-masing perincian belanja barang mencapai 69,96%.

- Belanja jasa terealisasi sebesar Rp. 4.162.441.689,00 atau 85,73 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.855.026.672,00 pembiayaan belanja jasa yang direalisasikan berdasarkan kebutuhan rutin yang menunjang kegiatan kantor termaksud di dalamnya anggaran gaji tenaga kontrak/non PNS, belanja iuran jaminan, belanja pembayaran pajak, belanja lembur, belanja paket/pengiriman, belanja tagihan listrik dan beberapa rincian belanja yang terdapat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang teknis. Rincian dari belanja jasa dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.386.540.052,00	2.908.134.309,00	85,87
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan /Asuransi	85.315.680,00	70.606.080,00	82,76
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	95.000.000,00	95.000.000,00	100
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	95.900.000,00	89.415.400,00	93,34
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	518.045.000,00	507.545.000,00	97,97
5.1.02.02.12.	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi,Bimbingan teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	674.225.940,00	491.740.900,00	72,93
Jumlah		4.855.026.672	4.162.441.689	85,73

Belanja jasa yang direalisasikan berdasarkan kebutuhan yang menunjang kegiatan kantor dan terdapat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang teknis.

- Belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp. 22.570.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 22.570.000,00 Rincian dari belanja pemeliharaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.170.000,00	8.170.000,00	100
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.400.000,00	14.400.000,00	100
Jumlah		22.570.000	22.570.000	100

Pembiayaan pada belanja pemeliharaan direalisasikan berdasarkan kebutuhan rutin yang menunjang kegiatan kantor dengan masing-masing perincian belanja barang mencapai 100%.

- Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar 294.135.346,00 atau 92,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.318.788.500,00 rincian dari belanja perjalanan dinas dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	318.788.500,00	294.135.346,00	92,27

Pembiayaan pada belanja perjalanan dinas direalisasikan berdasarkan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan Kabupaten di Provinsi NTT pelaksanaan kegiatan di dalam dan luar daerah, undangan kegiatan dan disposisi pimpinan terkait perencanaan.

- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp.38.750.00000 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 38.750.000,00 rincian dari Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.750.000,00	33.750.000,00	100
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	100
Jumlah		1.906.330.000,00	1.612.171.410,00	84,57

2.2. Belanja Modal

Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Modal- LRA	Rp.18.264.500	Rp.19.573.039.000

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 18.264.500 atau 93,06% dari target sebesar Rp.19.626.900 mengalami penurunan sebesar Rp.19.554.774.500 atau 0,09% dibandingkan tahun lalu senilai Rp.19.899.456.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.626.900,00	18.264.500,00	93,06

3. Surplus/Defisit LRA

Surplus/Defisit	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LRA	Rp. (9.156.832.750)	Rp. (36.142.473.472,83)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran.

B. Laporan Operasional (LO)

1. Pendapatan – LO

Pendapatan Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LO	Rp.11.551.574.965,43	Rp. 8.210.420.479,23

Pendapatan LO Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. 11.551.574.965,43,- yang terdiri dari realisasi retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 1.794.609.159,43. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Luar Badan Jalan sebesar *Rp 658.190.000,-* di PPP Tenau, PPI Oeba dan PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur, Retribusi Jasa Kepelabuhan sebesar *Rp 730.739.279,50,* di PPP Tenau, PPI Oeba dan PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur-, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebesar *Rp 2.678.027.500,-* di Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebesar *Rp 3.693.462.255,50,-* serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar *Rp 1.996.546.771,-* di PPP Tenau, PPI Oeba dan PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur, serta adanya pengakuan pendapatan denda tahun berjalan secara akrual basic sebesar *Rp.15.000.000,-* .

2. Beban – LO

Beban Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LO	Rp.27.849.437.543,32	Rp.34.037.322.597,50

Beban daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih. Sampai dengan 31 Desember 2025, beban daerah pada Laporan Operasional (LO) terealisasi sebesar Rp.27.849.437.543,32, mengalami pengurangan sebesar Rp.6.187.885.049 dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp.34.037.322.592,50,. Beban daerah tahun 2025 terdiri dari beban operasi serta beban penyusutan dan amortisasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari beban operasi

2.1 **Beban Operasi**

Beban operasi TA. 2025 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp.13.251.104.832,- Beban barang dan jasa sebesar Rp.5.611.993.140,67.Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing beban Operasi yang terdiri dari :

a) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
LO	Rp.13.251.104.832	Rp.11.955.058.873

Beban Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Pegawai dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 terealisasi Rp. 13.251.104.832 sedangkan beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terelisasi Rp. 11.955.058.873. Beban pegawai tahun 2025 terdiri dari :

- Beban Gaji dan tunjangan ASN terelisasi sebesar Rp. 11.058.152.235 tidak ada perbedaan antara nilai LO dan LRA.
- Beban tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp.306.029.079, tidak ada perbedaan antara nilai LO dan LRA.
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya terealisasi Rp.1.886.923.518,00 , tidak ada perbedaan antara nilai LO dan LRA

b) **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Dan Jasa LO	Rp.5.611.993.140,67	Rp.13.005.171.216

Beban Barang dan Jasa adalah pengeluaran atau komsumsi Aset untuk membeli barang dan jasa yang habis pakai periode 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2025 terealisasi Rp. 5.611.993.140,67 sedangkan beban barang dan jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2024 terealisasi Rp. 13.005.171.216,00 terdiri dari :

- Beban Barang terealisasi sebesar Rp.1.126.532.189,00. Tidak ada perbedaan antara nilai LO dan nilai LRA.
- Beban Jasa Kantor terealisasi sebesar Rp.4.130.005.605,67. Tidak terdapat perbedaan antara nilai LO dan nilai LRA.
- Beban pemeliharaan terealisasi sebesar Rp.22.570.000 tidak ada perbedaan antara nilai LO dan Nilai LRA.

- Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp.294.135.346. Tidak terdapat perbedaan antara nilai LO dan nilai LRA.
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp.38.750.000. Tidak terdapat perbedaan antara nilai LO dan nilai LRA.

c) Beban Penyisihan Piutang

Beban Barang	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Dan Jasa LO	Rp.334.506.668,48	Rp.251.177.055,89

Beban Penyisihan Piutang adalah estimasi biaya kerugian piutang yang tidak dapat ditagih dari pelanggan, diakui pada periode berjalan untuk menandingi pendapatan periode 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2025 terealisasi Rp. 334.506.668,48 sedangkan periode 01 Januari s/d 31 Desember tahun 2024 terealisasi Rp. 251.177.055,89,00 terdiri dari :

- Beban penyisihan piutang retribusi daerah terealisasi sebesar Rp.249.494.665,47,00. Tidak ada perbedaan antara nilai LO dan nilai LRA.
- Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp.85.012.003,01 Tidak terdapat perbedaan antara nilai LO dan nilai LRA.

d) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Dan Amortisasi LO	Rp.8.639.623.902	Rp.8.825.915.448

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan pengakuan atas berkurangnya nilai aset tetap akibat pemakaian dan berjalannya waktu. Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, beban penyusutan dan amortisasi pada LO terealisasi sebesar Rp. 8.639.623.902, sedangkan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 8.825.915.448. Beban Penyusutan tahun 2025 terdiri :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah biaya pengurangan nilai aset peralatan dan mesin yang digunakan perangkat Daerah karena pemakaian atau berjalannya waktu. Beban penyusutan juga dikenal sebagai depresiasi perhitungan beban penyusutan tahun 2025 atas aset peralatan mesin yang dimiliki SKPD selama tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.316.491.570,05

- Beban penyusutan gedung dan bangunan biaya pengurangan nilai aset gedung dan bangunan yang digunakan perangkat daerah karena pemakaian atau berjalannya waktu. Perhitungan beban penyusutan tahun 2025 atas aset gedung dan bangunan yang dimiliki SKPD selama tahun 2025 adalah sebesar Rp.1,817.408.602,74
- Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti bagian-bagian yang rusak dari jalan, jaringan, dan irigasi tersebut. Perhitungan beban penyusutan tahun 2025 adalah sebesar Rp.5.289.657.649,74
- Beban penyusutan Properti Investasi adalah alokasi sistematis biaya perolehan bangunan (bukan tanah) selama masa pemanfaatannya yang diakui sebagai pengurang laba akuntansi tahunan akibat penurunan nilai fisik atau keusangan. Perhitungan beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2025 adalah sebesar Rp.216.066.079,63

3. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
LO	Rp. (16.282.862.557,89)	Rp. (25.826.902.113,27)
Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran.		

C. Neraca SKPD

Neraca adalah Laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada suatu waktu tertentu yang mencakup asset, kewajiban dan Ekuitas Pos-Pos Neraca SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur per 2025 adalah sebagai berikut :

1. ASET	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp.265.057.226.484,59	Rp.272.680.740.365,25

Total Aset tahun 2025 sebesar Rp. 265.057.226.484,59 sedangkan total Aset tahun 2024 Rp. 272.680.740.365,25 nilai aset tahun 2025 mengalami pengurangan sebesar Rp.7.623.513.881 dari nilai aset tahun 2024. Dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan
	Aset Lancar	1.285.069.679,56	417.151.594,05	867.918.085,51
1.	Aset tetap	236.741.398.407,11	269.113.826.244,74	(32.372.427.837,63)
2.	Aset lainnya	3.031.126.126,46	3.149.762.526,46	(118.636.400)
JUMLAH		265.057.226.484,59	272.680.741.365,25	(7.623.513.516,66)

1.1 Aset Lancar

1.1.1 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Pemakaian 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Kekayaan Daerah **Rp. 1.784.123.441,49,-** **Rp. 646.700.770,83,-**

Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebesar Rp.646.700.770,83,- sedangkan saldo akhir piutang retribusi daerah sebesar Rp. 1.784.123.441,49,- yang merupakan saldo piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada PPP Tenau, PPI Oeba dan lain-lain sebesar Rp. 1.686.773.441,49 dan Piutang Udang sebesar Rp. 97.350.000.(Rincian terlampir).

URAIAN/NAMA	SALDO AWAL PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG AWAL	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG	MUTASI		SALDO AKHIR PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG AKHIR	PENDAPATAN DENDA
				BERTAMBAH	BERKURANG (SETOR)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TENAU DAN OEBA	549.350.770,83	386.928.646,46	45.000.000,00	1.874.822.691,66	782.400.021	1.686.773.441,49	648.857.311,93	9.900
TENAU	3.515.625,00	2.315.625,00	-	448.609.041,66	220.300.875	231.823.971,66	14.817.113,33	-
OEBA	168.835.145,83	167.613.021,46	45.000.000,00	1.161.213.650	502.099.146	872.949.649,83	197.540.198,60	9.900
LAIN-LAIN	377.000.000,00	217.000.000,00	-	265.000.000,00	60.000.000	582.000.000	436.500.000,	-
UDANG	97.350.000,00	97.350.000,00	-	-	-	97.350.000	97.350.000	-
JUMLAH	646.700.770,83	484.278.646,46	45.000.000,00	1.874.822.691,66	782.400.021	1.784.123.441,49	746.207.311,93	9.900

1.1.2 Piutang lain-lain PAD yang sah

Piutang Lain-lain 31 Desember 2025 31 Desember 2024
PAD yg Sah **Rp. 131.609.999,00,-** **Rp. 86.609.999,00,-**

Saldo Awal Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp. 86.609.999,00,-. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.000.000,- sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp.131.609.999,- nilai ini terdiri dari piutang tuntutan ganti kerugian daerah/terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang merupakan temuan kekurangan volume pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.711.800.000,-, nilai setelah pemeriksaan sebesar Rp.11.626.360.801,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 85.439.199,- (Rincian terlampir)

NO	URAIAN/NAMA	NILAI KONTRAK	NILAI SETELKAH PEMERIKSAAN	KELEBIHAN PEMBAYARAN	PENYISIHAN PIUTANG AWAL	SALDO AKHIR	PENYISIHAN PIUTANG AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Temuan kekurangan Volume Pekerjaan	11.711.800.000	11.626.360.801	85.439.199	427.195,99	85.439.199	85.439.199
JUMLAH		11.711.800.000	11.626.360.801	85.439.199	427.195,99	85.439.199	85.439.199

kemudian saldo piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 46.170.800,- merupakan piutang denda terkait sewa lahan yang terbawa dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.170.800,- serta koreksi Piutang denda Cold Storage Rp.30.000.000,- dan pengakuan Piutang baru denda pada tahun berjalan sebesar Rp.15.000.000,- (Rincian terlampir).

NO	URAIAN/NAMA	SALDO AWAL PIUTANG DENDA	PENYISIHAN PIUTANG AWAL	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6
1	Marianus Lodowick Dea/Flotim	1.152.050,00		-	1.152.050,00
2	Sinar	18.750,00		-	18.750,00
3	Cold Storage/Komira			45.000.000,00	45.000.000,00
JUMLAH		1.170.800,00	-	45.000.000,00	46.170.800,00

1.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Pendapatan Rp. (819.437.510,93),- Rp. (484.705.842,45),-

Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp. (819.437.510,93),- yang merupakan saldo Penyisihan piutang retribusi sebesar Rp.(733.998.311,93,-, dan Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. (85.439.190) telah dijabarkan dalam table Piutang sebelumnya, Rincian terlampir.

1.1.4 Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Rp. 200.982.750,- Rp. 168.546.666,67,-

NO	URAIAN/NAMA	SALDO AWAL BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA	MUTASI		SALDO AKHIR BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Rumah dan Kantor Dinas	168.546.666,67	200.982.750,00	168.546.666,67	200.982.750,00
JUMLAH		168.546.666,67	200.982.750,00	168.546.666,67	200.982.750,00

Saldo Awal Beban dibayar dimuka adalah sebesar Rp. 168.546.666,67,- yang sewa rumah dan kantor dinas. Pada periode tahun 2025 mengalami mutasi bertambah sebesar Rp.200.982.750,- akibat perhitungan nilai pembebanan baru sewa dibayar dimuka periode tahun berjalan serta adanya mutasi berkurang sebesar Rp.168.546.666,67,- merupakan nilai penyesuaian atas koreksi terhadap saldo awal sewa dibayar dimuka, sehingga saldo akhir pelaporan Beban sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 200.982.750,- (Rincian terlampir).

1.1.5 Persediaan

Persediaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 0	Rp. 0,-

Saldo awal persediaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sebesar Rp.0,- pada periode berjalan terdapat penambahan akibat belanja barang persediaan sebesar Rp.1.126.532.189,- namun semua barang persediaan tersebut sudah habis digunakan/dipakai untuk kegiatan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sehingga Per 31 Desember 2025 tidak mempunyai nilai saldo sisa persediaan.

1.2 Aset Tetap

Aset Tetap	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 236.741.398.407,11	Rp. 269.113.826.244,74

Aset Tetap adalah asset berwujud yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu tahun. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Total aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 269.113.826.244,74 sedangkan total aset tahun 2025 sebesar Rp. 236.741.398.407,11. Nilai aset tahun 2025 mengalami perubahan dari nilai aset tahun 2024. Aset Tetap diperoleh dari :

1.2.1 Tanah

Tanah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 70.178.327.266,31	Rp. 88.636.943.266,31

Aset Tanah adalah Aset Tetap yang berupa tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah. Saldo Tanah 31 Desember 2025 sebesar Rp. 70.178.327.266,31 dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 88.636.943.266,31, Rincian mutasi tanah sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Saldo Awal Harga Perolehan 2025	88.636.943.266,31
2.	Mutasi Bertambah	0
3.	Mutasi Berkurang	(18.458.616.000)
	Saldo Akhir Harga Perolehan 2025	70.178.327.266,31

Berdasarkan penyajian pada table diatas dapat dijelaskan bahwa saldo awal perolehan aset tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sebesar Rp.88.636.943.266,31 mengalami mutasi berkurang akibat koreksi reklasifikasi sebesar Rp.(18.458.616,-) masuk ke dalam aset Properti Investasi.

1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Dan Mesin	Rp. 32.814.008.186,24	Rp. 32.795.743.686,24

Aset Peralatan dan Mesin adalah Aset Tetap yang berupa peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah. Saldo aset peralatan dan mesin 31 Desember 2025 sebesar Rp. 32.814.008.186,24 dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 32.795.743.686,24, Rincian mutasi aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Saldo Awal Harga Perolehan 2025	32.795.743.686,24
2.	Belanja Modal Tahun 2025	18.264.500
3.	Koreksi Berkurang Kapitalisasi	0
4.	Mutasi Bertambah	0
	Saldo Akhir Harga Perolehan 2025	32.814.008.186,24

Dalam perhitungan saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 terdapat penambahan aset Peralatan dan Mesin melalui Belanja Modal sebesar Rp. 18.264.500,00 yang merupakan belanja Modal alat bengkel bermesin Rp. 650.000, Belanja Modal Komputer Rp. 17.614.500.

1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Bagunan	Rp. 91.268.850.137,04	Rp. 97.256.960.785,04

Aset tetap gedung dan bangunan merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan operasional. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 91.268.850.137,04 mengalami penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 97.256.960.785,04. Penyajian pada table berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Saldo Awal Harga Perolehan 2025	97.256.960.785,04
2	Belanja Modal Tahun 2025	0
3	Koreksi Bertambah	264.430.000
4	Koreksi Berkurang	(6.522.540.648)
	Saldo Akhir Harga Perolehan 2025	91.268.850.137,04

Dalam perhitungan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 terdapat koreksi bertambah sebesar Rp. 264.430.000,- merupakan hibah masuk dari Pemerintah Kabupaten Ende berupa 1 unit Pos Jaga dan Pagar sesuai BAST Nomor 137/1/68/2022, BU.008/Pem.10/249/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022. Serta adanya mutasi berkurang sebesar Rp. (6.522.540.648),- merupakan koreksi reklasifikasi sebesar masuk ke dalam aset Properti Investasi.

1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, irigasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
jaringan	Rp.151.441.212.604	Rp.152.691.920.604

Aset jalan, irigasi dan jaringan adalah aset tetap yang mencakup infrastruktur fisik yang dibangun, dimiliki dan atau dikuasai pemerintah serta dalam kondisi siap pakai untuk menunjang operasional pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dijabarkan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Saldo Awal Harga Perolehan 2025	152.691.920.604
2.	Belanja Modal Tahun 2025	0,00
3.	Koreksi Bertambah	0,00
4.	Koreksi Berkurang	(1.250.708.000)
	Saldo Akhir Harga Perolehan 2025	151.441.212.604

Adanya mutasi berkurang sebesar Rp. (1.250.708.000) merupakan koreksi reklasifikasi sebesar masuk ke dalam aset Properti Investasi. Saldo aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp.151.441.212.604,-

1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Lainnya	Rp. 447.163.500	Rp. 447.163.500

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak termasuk dalam kelompok aset tetap lainnya, tetapi tetap digunakan dalam kegiatan operasional. Penjelasan terkait aset tetap lainnya sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Saldo Awal Harga Perolehan 2025	447.163.500
2.	Belanja Modal Tahun 2025	0,00
3.	Koreksi Bertambah	0,00
4.	Koreksi Berkurang	0,00
	Saldo Akhir Harga Perolehan 2025	447.163.500

Saldo awal aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 447.163.500 dan tidak mengalami perubahan pada saldo akhir tahun 2025.

1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 301.570.000	Rp. 301.570.000

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset tetap seperti gedung, jalan, atau mesin yang sedang dalam proses pembangunan, pemasangan, atau penyelesaian, dan belum siap digunakan.

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Saldo Awal Harga Perolehan 2025	301.570.000
2.	Belanja Modal Tahun 2025	0,00
3.	Koreksi Bertambah	0,00
4.	Koreksi Berkurang	0,00
	Saldo Akhir Harga Perolehan 2025	301.570.000

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 301.570.000 merupakan nilai saldo akhir tahun 2024 dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 301.570.000,- yang merupakan nilai terhadap 4 paket pekerjaan tahun 2023 yang masih dalam tahapan perencanaan, akibat adanya refocusing anggaran sehingga proses fisik/konstruksi tidak dapat di lanjutkan. Serta akibat ketidaktersediaan anggaran pada tahun 2024 dan 2025 sehingga nilai tersebut masih tetap tersaji dalam neraca aset per 31 Desember 2025.(Bukti pernyataan terlampir)

1.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. (109.709.733.286,48)	Rp. (103.286.475.596,85)

Total Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (109.709.733.286,48) mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.423.257.689,63 dari keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (103.286.475.596,85) dengan rincian mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan
1.	AKM Penyusutan Peralatan & Mesin	(28.226.289.242,81)	(26.909.797.672,76)	1.316.491.570,05
2.	AKM Penyusutan Gedung & Bangunan	(19.086.626.003,22)	(18.477.639.866,71)	608.986.136,51
3.	AKM Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	(62.396.818.040,45)	(57.899.038.057,38)	4.497.779.983,07
JUMLAH		(109.709.733.286,48)	(103.286.475.596,85)	6.423.257.689,63

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp.(26.909.797.672,76) mengalami Kenaikan karena adanya beban penyusutan sebesar Rp. 1.316.491.570,05 sehingga akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 menjadi Rp(28.226.289.242,81).
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.(18.477.639.866,71) mengalami kenaikan akumulasi sebesar Rp. 608.986.136,51 yang terdiri dari beban penyusutan Rp.1.817.408.602,75, koreksi bertambah terhadap penyusutan sebesar Rp.15.865.800,- akibat hibah masuk aset gedung dan bangunan dari Pemkab Ende. Serta adanya koreksi berkurang penyusutan sebesar Rp(1.224.288.266,24,-) hasil reklafikasi gedung dan bangunan ke Properti Investasi, sehingga per 31 Desember 2025 menjadi Rp.(19.086.626.003,22).
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp.(57.899.038.057,38) mengalami kenaikan akumulasi sebesar Rp.4.497.779.983,07 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp.5.289.657.649,74,- Serta adanya koreksi berkurang penyusutan sebesar Rp(791.877.666,67,-) hasil JIJ ke Properti Investasi sehingga per 31 Desember 2025 menjadi Rp.(62.396.818.040,45).

1.3 Dana Cadangan

Properti Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 23.999.632.635,46	Rp. 0

Dana cadangan adalah sebagian pendapatan (daerah/koperasi/entitas) yang disisihkan dan ditempatkan dalam rekening khusus untuk membiayai kebutuhan besar atau pengeluaran tak terduga yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana ini bertujuan untuk menjamin stabilitas keuangan, mengantisipasi resiko, dan membiayai tujuan spesifik. Disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Saldo Awal Harga Perolehan 2025	0,00
2.	Belanja Modal Tahun 2025	0,00
3.	Koreksi Bertambah	26.231.864.648
4.	Koreksi Berkurang	0,00
	Saldo Akhir Harga Perolehan 2025	26.231.864.648

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 tidak terdapat dana cadangan sedangkan Tahun 2025 terdapat Nilai Properti Investasi sebesar Rp.26.231.864.648,- yang terdiri dari Rp. 23.999.632.635,46. Yang merupakan hasil reklasifikasi dari aset tetap tanah Rp.18.458.616.000,- gedung dan bangunan sebesar Rp.6.522.540.648,- serta Jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp.1.250.708.000,-

1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp.3.031.126.126,46,-	Rp.3.149.762.526,46

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp. 3.031.126.126,46,- mengalami penurunan dibandingkan per 31 Desember 2024 Rp. 3.149.762.526,46, dijelaskan dalam tabel berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
1.	Aset Tidak Berwujud	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00
2.	Aset Lainnya-Aset Lain Lain -Lain Lainnya	734.680.436,46	853.316.836,46	(118.636.400)
3.	Aset Lain Rusak Berat	7.852.062.000,00	7.852.062.000,00	0,00
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(5.555.616.310,00)	(5.555.616.310,00)	0,00
5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(59.950.000,00)	(59.950.000,00)	0,00
Jumlah		3.031.126.126,46	3.149.762.526,46	(118.636.400)

Penjelasan tentang Aset Lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Aset tidak berwujud sebesar Rp.59.950.000,- tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud juga sebesar (Rp.59.950.000),sehingga nilai buku aset tak berwujud adalah Rp.0,- (Rincian terlampir)
- Aset Lainnya – Aset Lain Lain-lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 734.680.436,46 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya setoran terhadap temuan perjalanan dinas sebesar Rp.(9.318.200),-. Serta adanya setoran terhadap temuan kekurangan volume pekerjaan CV. Wijaya Mandiri dan CV. Kencana Raya sebesar Rp.(100.000.000),-

- Aset ini merupakan aset non lancar yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap maupun Aset Tak Berwujud, namun masih memiliki nilai manfaat administratif.
- Aset Lain Rusak Berat (RB) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 7.852.062.000 dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2024. Aset ini merupakan aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi dan telah dihentikan operasionalnya, namun masih tercatat dalam administrasi barang milik daerah.
 - Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat sebesar Rp.(5.555.616.310),- merupakan nilai kumulatif penyusutan atas aset yang mengalami kondisi rusak berat tersebut. Tidak mengalami perubahan dari tahun 2024. Sehingga nilai buku aset rusak berat sebesar Rp. 2.296.445.690,-

2. KEWAJIBAN

Pendapatan diterima 31 Desember 2025 31 Desember 2024
dimuka Rp. 62.962.750,67 Rp.720.149.239,44

Pendapatan diterima dimuka adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar. Dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

NO	URAIAN/NAMA	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Oeba, Tenau dan Lain2	720.149.239,44	62.962.750,67	720.149.239,44	62.962.750,67
	JUMLAH	720.149.239,44	62.962.750,67	720.149.239,44	62.962.750,67

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kewajiban Jangka Pendek berupa pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp.62.962.750,67 mengalami penurunan sebesar Rp.657.186.488,77 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 yang masih tercatat sebesar Rp.720.149.239.44. dikarenakan adanya mutasi bertambah karena perhitungan pendapatan diterima dimuka baru pada periode berjalan sebesar Rp.62.962.750,67,- serta adanya mutasi berkurang sebesar Rp.720.149.239,44 merupakan penyesuaian terhadap pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun lalu/saldo awal (Rincian terlampir)

3. EKUITAS

Ekuitas	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp.264.979.973.097,92	Rp.271.960.591.125,81

Ekuitas adalah gambaran jumlah kekayaan perangkat daerah setelah di kurangi jumlah kewajiban. Nilai ekuitas TA. 2025 sebesar Rp. 264.979.973.097,92 sedangkan TA. 2024 Rp. 271.960.591.125,81. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar Rp. 6.980.618.027,89.

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp.264.994.264.097,92	Rp.271.960.51.125,81

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan ekuitas perangkat daerah selama periode tertentu. Nilai perubahan ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 271.960.591.125,81 diperoleh dari :

Ekuitas Awal 2025	271.960.51.125,81
RK PPKD	9.156.832.750
Surplus/Defisit-LO	(16.282.862.577,89)
Dampak Perubahan Atas Aset Tetap	264.430.000
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	(15.865.800)
Dampak Perubahan Atas Penyisihan	(225.000)
Dampak Perubahan Atas Aset Lain	(118.636.400)
Dampak Perubahan Atas Piutang	30.000.000
JUMLAH EKUITAS AKHIR	264.994.264.097,92

1. Ekuitas Awal
- Ekuitas awal Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 271.960.591.125,81 sesuai dengan ekuitas akhir per 31 Desember 2024.
2. RK PPKD
- RK PPKD pada akhir 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp. 9.156.832.750
3. Surplus/Defisit LO
- Surplus/Defisit LO tahun 2025 sebesar Rp. (16.282.862.577,89). Perhitungan surplus defisit LO didapat dari selisih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan pada Laporan Operasional (LO). Surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari beban, sedangkabn defisit terjadi jika sebaliknya.

4. Dampak Perubahan Atas Aset Tetap

Dampak Perubahan Atas Aset Tetap pada akhir 31 Desember 2025 sebesar Rp. 264.430.000 adalah dampak koreksi yang terjadi pada nilai penyusutan aset pada tahun 2025 akibat hibah masuk aset gedung dan bangunan dari Pemkab Ende yang menjadi penambah ekuitas pada periode berjalan.

5. Dampak Perubahan Atas Penyusutan

Dampak Perubahan Atas Penyusutan pada akhir 31 Desember 2025 sebesar Rp. (15.865.800) adalah dampak koreksi yang terjadi pada nilai penyusutan aset pada tahun 2025 akibat hibah masuk aset gedung dan bangunan dari Pemkab Ende yang menjadi penambah ekuitas pada periode berjalan.

6. Dampak Perubahan Atas Penyisihan

Dampak Perubahan Atas Penyisihan pada akhir 31 Desember 2025 sebesar Rp. (225.000) adalah dampak koreksi yang terjadi pada nilai penyisihan aset pada tahun 2025.

7. Dampak Perubahan Atas Aset Lain

Dampak Perubahan Atas Aset Lain pada akhir 31 Desember 2025 sebesar Rp. (118.636.400) adalah dampak koreksi yang terjadi pada aset lain pada tahun 2025 yang mengurangi ekuitas.

8. Dampak Perubahan Atas Piutang

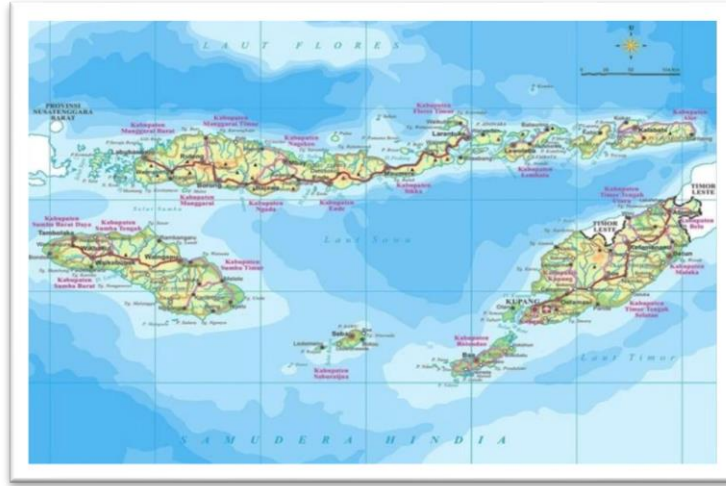
Dampak Perubahan Atas Piutang pada akhir 31 Desember 2025 sebesar Rp. 30.000.000 adalah dampak koreksi yang terjadi pada nilai piutang pada tahun 2025. Merupakan koreksi terhadap pengakuan perhitungan ulang piutang denda tahun 2023 dan 2024 sesuai bunyi kontrak terkait sewa lahan yang menambah ekuitas.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.1.1 Tugas dan fungsi serta Struktur Organisasi



Gambar 1. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan disektor kelautan dan perikanan yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 – 2026.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 6 Tahunn 2023 tentang Prubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

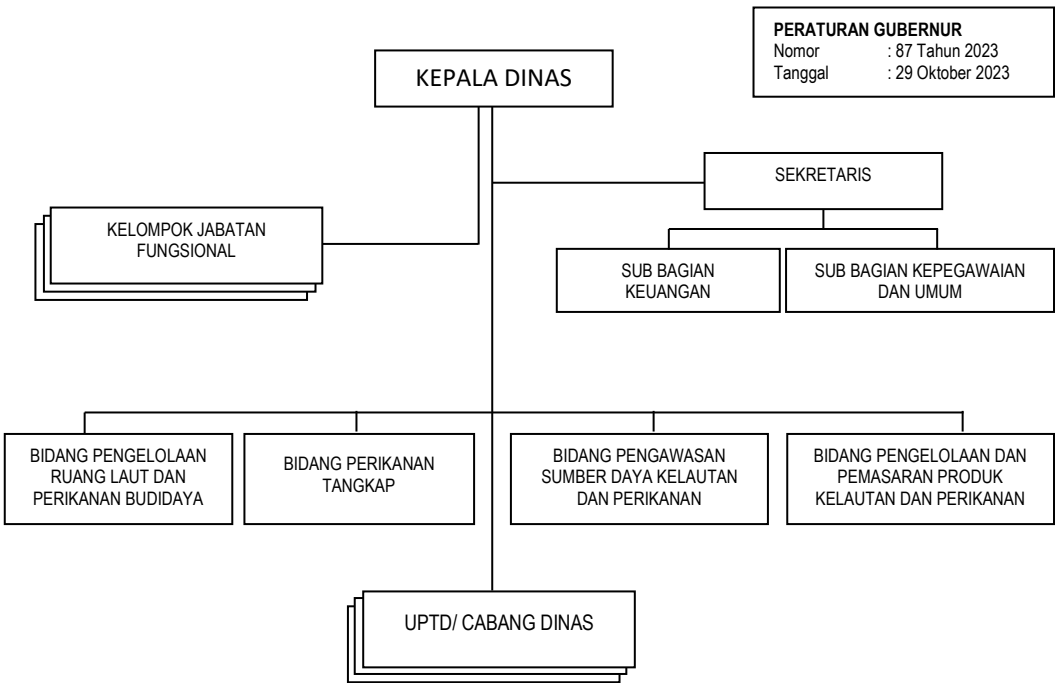
Adapun fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melaksanakan :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
- 3. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya
- 4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- 5. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 6. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
- 7. Kepala Cabang dinas Wilayah I, II, III, IV, V
- 8. Kepala UPTD. Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan sekitarnya

**BAGAN 4.1. STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT**



4.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

4.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 129 Orang. Dilihat dari jenis kelamin maka jumlah laki-laki sebanyak 83 orang dan perempuan sebanyak 46 orang. Sedangkan jika dilihat menurut pangkat dan golongan maka Golongan IV sebanyak 15 orang, Golongan III sebanyak 93 orang dan golongan II sebanyak 21 orang.

Dari tingkat pendidikan per 31 Desember 2025 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1. Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S3 (Doktor)	-	1	1
2	S2 (Pasca sarjana)	7	5	12
3	S1 (Sarjana)	43	32	75
4	D IV (Diploma IV)	6	1	7
5	D III (Diploma III)	3	1	4
6	SLTA/ sederajat	18	6	24
7	Paket C	1	-	1
8	SMP/ sederajat	4	-	4
8	SD/SR	1	-	1
TOTAL		83	46	129

4.1.2.2 Sumber Daya Aset

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka sampai 31 Desember 2025 telah memiliki aset-aset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 618.487m² yang tersebar di 12 (dua belas) Kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut :
 - Kota Kupang seluas 105.440 m²
 - Kabupaten Kupang seluas 76.225 m²
 - Kabupaten TTS seluas 38.228 m²
 - Kabupaten TTU seluas 41.275 m²
 - Kabupaten Alor seluas 15.023 m²
 - Kabupaten Flores Timur seluas 37.317 m²
 - Kabupaten Ende seluas 19.495 m²
 - Kabupaten Ngada seluas 90.450 m²
 - Kabupaten Nagekeo seluas 23.000 m²
 - Kabupaten Manggarai seluas 17.524 m²
 - Kabupaten Sumba Timur seluas 112.910 m²
 - Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 41.600 m²
- b. Gedung dan bangunan sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) unit
- c. Kendaraan roda 6 sebanyak 1 unit
- d. Kendaraan roda 4 berjumlah 16 unit (9 unit di kantor pusat sedangkan 7 unit di Cabang dinas/UPT)
- e. Kendaraan roda 3 berjumlah 3 unit

- f. Kendaraan roda 2 berjumlah 58 unit (36 unit di kantor pusat, 22 unit tersebar di Cabang dinas dan UPT)
- g. Kapal Pengawas berjumlah 3 unit (1 Unit di kantor pusat, 1 Unit di UPTD. Taman Perairan Alor dan laut sekitarnya, 1 Unit di Cabang dinas wilayah Flores Timur)

4.1.3 Informasi lain-lain

4.1.3.1 Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang Persediaan (UP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, Uang Persediaan atau yang biasa disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

Dalam pelaksanaan Tahun anggaran 2025, Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran mengalami peningkatan pada Bulan November melalui mekanisme pengajuan Tambah Uang Persediaan (TUP) oleh bendahara Pengeluaran. Per 31 Desember 2025 terdapai sisa Uang Persediaan dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 (Bukti setoran terlampir).

No.	Dinas/Unit	CP UP (Rp)	CP TU (Rp)
1	Kantor Dinas	7.264.599	5.925.232
2	KCD Ende	445.424	-
3	KCD Sumba	214.400	-
4	UPTD. Alor	800.200	-
Jumlah		8.724.623	5.925.232
TOTAL			14.649.855

4.1.3.2 Realisasi Pendapatan Tidak Mencapai Target

Terdapat 3 (tiga) Obyek Retribusi Daerah yang pada Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target. Adapun obyek retribusi dimaksud terinci sebagai berikut :

- Penyediaan Tempat Khusus Parkir Luar Badan Jalan per tanggal 31 Desember 2025 terealisasi Rp 658.190.000,- atau 87,76 % dari target sebesar Rp 750.000.000,-
Tidak tercapainya target ini karena Sistem parkir yang masih manual yang memungkinkan tidak tercatatnya kendaraan yang masuk/keluar oleh petugas parkir serta masih diberlakukan pembayaran Tunai yang memungkinkan terjadinya kelebihan bayar, kekurangan bayar bahkan tidak bayar.
- Jasa Kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp 730.739.279,50,- atau 70,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.031.407.600,-

Kondisi tidak tercapainya target ini karena penurunan aktifitas bongkar muat kapal perikanan di pelabuhan perikanan hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang baik sehingga terdapat penurunan aktifitas ekonomi di pangkalan pelabuhan perikanan. Selain itu areal kolam labuh yang tidak optimal untuk menampung kapal erikanan yang akan tambat/labuh akibat endangkalan atau areal kolam labuh yang tidak cukup luas untuk disbanding dengan jumlah kapal yang masuk.

- Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tahun 2025 direalisasi sebesar Rp 3.693.462.255,50,- atau 82,54 % dari target sebesar Rp. 4.475.000.000

Kondisi tidak tercapainya target ini disebabkan oleh belum optimalnya produksi/produktivitas diinstalasi BBIS Noekele, lemahnya pengawasan terhadap produk perikanan yang diantar pulaukan karena kurangnya jumlah SDM Pengawasan di lapangan, belum tersosialisasikan dengan baik regulasi sector kelautan dan perikanan kepada semua pelaku usaha di kabupaten/kota serta system pembayaran dan pencatatan yang masih manual atau belum sepenuhnya menggunakan system digitalisasi/online.

4.1.3.3 Belanja Tidak Terserap

Belanja tidak terserap sebesar *Rp 3.257.016.931,-* atau *14,69 %* dari anggaran yang tersedia disebabkan oleh unsur penghematan dan beberapa hal antara lain :

- Adanya perubahan maupun pergeseran anggaran yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang berpengaruh terhadap perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan penumpukan kegiatan dan anggaran pada periode tertentu sehingga proses pencairan anggaranpun akan ikut berpengaruh.
- Proses pergantian Uang Persediaan (UP) disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah.
- Program dan kegiatan yang sumber pendanaannya dari DAU dan PAD dibatasi pelaksanaannya sehingga berpengaruh pada serapan anggaran.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, telah memuat informasi penggunaan keuangan selama tahun anggaran 2025. Sehingga lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan ini dibuat untuk mendukung pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik, transparan dan efisien.

Laporan ini merupakan hasil proses pencatatan dan pengiktisaran data transaksi keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan secara jelas dan transparan. Demikian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kami. Terima Kasih.

Kupang, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

\$_{ttd_pengirim}\$

SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701019 199903 2 004